

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran perempuan dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan di lingkungan masyarakat asli Bupolo cukup mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat asli di berbagai sektor. Namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi terkait pembangunan infra struktur, fasilitas Pendidikan serta kesehatan bagi komunitas Adat pulau Buru terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Secara khusus penelitian ini menghasilkan 5 point kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 5 pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Kedudukan dan peran perempuan asli Buru (Bupolo) tidak terlepas adanya tiga peran gender pada perempuan yakni peran produksi, peran reproduksi dan peran sosial. Namun dalam penerapannya peran domestik (reproduktif) lebih banyak diperankan perempuan sementara peran reproduksi dan peran sosial lebih banyak dilakoni laki-laki. Beberapa hal yang menyebabkan perempuan sulit mengambil peran laki-laki adalah Sumber Daya manusia yang rendah serta budaya masyarakat asli yang cenderung membatasi perempuan berkiprah diluar rumah. Dampak dari adanya keterbatasan-keterbatasan terhadap perempuan adalah munculnya diskriminasi gender (subordinasi, stereotipe, marginalisasi, *double burden* dan *violence*).
2. Umumnya persepsi masyarakat terhadap kedudukan maupun peran perempuan asli Buru cukup beragam. Sebagian menyatakan bahwa peran perempuan Bupolo sudah mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Sebagian memaparkan bahwa perempuan Bupolo masih terikat pada budaya, adat atau kebiasaan yang sebenarnya kurang mendukung peran perempuan di masyarakat. Dari aspek gender sendiri peran ganda yang paling banyak disoroti, dimana beban perempuan lebih banyak dari laki-laki. Sementara kekerasan fisik hampir tidak ditemui. Hal ini dilatar belakangi oleh sanksi

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adat yang mengikat bagi masyarakat asli Buru. Permasalahan warga asli atau warga KAT lebih banyak diselesaikan dalam lingkup adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat seperti *kepala soa*, *hinolong*, *Kaksodin* hingga yang tertinggi adalah raja. Jarang permasalahan diselesaikan sampai ke jalur hukum (kepolisian). Permasalahan masyarakat asli lebih banyak diselesaikan lewat mediasi-mediasi adat oleh tokoh-tokoh adat setempat.

3. Budaya pada prinsipnya adalah hasil budi, karya dan karsa manusia sehingga setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Membandingkan serta mengkaitkan hak-hak kewarganegaraan perempuan Bupolo maka landasan yang digunakan adalah pasal-pasal yang termuat di dalam Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945. Faktanya amanat UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada wilayah-wilayah adat tertentu karena terbentur pada Budaya yang dianut masyarakat setempat. Namun perlahan-lahan seiring perkembangan zaman budaya yang bertentangan dengan amanat konstitusi mulai mengalami penyusutan. Begitu pula dengan etnis Bupolo. Namun demikian masih ada beberapa etnis di Buru yang masih mempertahankan budaya yang dianut meskipun bertentangan dengan UUD. Beberapa yang masih dipertahankan hingga saat ini meskipun sudah banyak yang berubah antara lain, hak menempuh pendidikan formal bagi perempuan, pernikahan dini (kawin piara) bagi anak perempuan, anak adat (anak koin) bagi anak laki-laki maupun perempuan, serta tidak adanya hak waris bagi anak perempuan. Dampak dari budaya yang bias gender tersebut menyebabkan perempuan tidak diuntungkan padahal UUD NRI 1945 maupun aturan hukum lainnya semisal Hukum islam justru menempatkan perempuan dalam kedudukan yang mulia, bahkan setara dengan laki-laki meskipun dalam pembagian hak waris perempuan mendapat warisan tidak sebanyak laki-laki.
4. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat asli Buru dapat ditemui pada pembangunan infra struktur berupa pembangunan jalan, dan jembatan untuk kemudahan transportasi masyarakat asli. Bagi komunitas adat terpencil sendiri pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Buru telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan membangun sejumlah rumah layak huni semi permanen sehingga masyarakat dapat menetap dan mencari nafkah di sektor pertanian dengan melibatkan dinas pertanian terkait. Dari aspek pendidikan pemerintah telah membangun sekolah-sekolah di wilayah komunitas adat Buru baik di dataran tinggi maupun di wilayah dataran rendah. Mengirim dan memberikan beasiswa bagi anak-anak asli Buru untuk menempuh pendidikan tinggi di luar daerah. Diharapkan sekembalinya dapat mengabdikan di daerah masing-masing. Melaksanakan program pelayanan kesehatan bagi komunitas adat baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi.

5. Beberapa hambatan yang ditemui terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat Bupolo bisa berasal dari masyarakat, kondisi alam, maupun dari budaya yang dianut. Kendala lainnya berasal dari para ASN yang bertugas pada wilayah-wilayah komunitas Adat Buru. Permasalahan terkait pembangunan dan pelaksanaan pemberdayaan pada Komunitas Adat Terpencil antara lain: Jangkauan menuju wilayah-wilayah KAT, jalan yang rusak, listrik belum ada, terbatasnya kendaraan umum, bahkan di ibukota kabupaten transportasi umum adalah ojek, kualitas pendidikan masih rendah, fasilitas kesehatan masih memprihatinkan, tenaga guru banyak bolos, tenaga kesehatan masih sedikit, tidak ada perumahan guru dan tenaga kesehatan. Hambatan lainnya adalah terbatasnya anggaran pembangunan, kurangnya koordinasi antar instansi dan lemahnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang melaksanakan tugasnya pada wilayah-wilayah adat khususnya pada wilayah Komunitas adat Terpencil.
6. Peran organisasi kemasyarakatan (*civil society*) pada komunitas adat Buru sudah cukup baik meskipun secara spesifik belum menyentuh kepada hak-hak kewarganegaraan perempuan asli Buru. Hal ini dikarenakan peran-peran organisasi kemasyarakatan bersifat umum pada komunitas adat dan sebagian besar bergerak dalam aspek keagamaan dan pendidikan. Organisasi Perempuan misalnya yang tergabung dalam pengajian-pengajian cukup berperan pada perempuan asli Buru melalui program pengajian pada wilayah-wilayah adat. Meskipun belum semua wilayah adat tersentuh program tersebut. Sebagian besar karena terkendala anggaran, sebagian lagi

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karena tidak ingin memasuki wilayah privat masyarakat adat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan bukan didasari oleh program tahunan atau bulanan melainkan karena momen-momen hajatan nasional atau peringatan hari-hari besar agama. Organisasi-organisasi semisal OKP dan Ormas lebih banyak membuat program pemberdayaan kepada perempuan di intra organisasi. Pemberdayaan kepada masyarakat adat lebih banyak melibatkan dinas-dinas terkait bukan atas program mandiri.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan terdapat sejumlah implikasi yang patut menjadi catatan penelitian, yaitu:

1. Dominannya peran perempuan Bupolo di sektor domestik menyebabkan perempuan tidak mampu berkiprah di masyarakat (peran sosial). Sementara peran publiknya yakni peran produktif menjadi pemicu perempuan mengalami peran ganda (*double burden*). Kiranya hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten Buru bersama dinas-dinas terkait dan kelompok civil society untuk melakukan program-program pembinaan dan pemberdayaan kepada perempuan Bupolo
2. Nilai-nilai budaya Buru yang sarat norma, etika dan estetika mampu menjadi pedoman hidup masyarakat Bupolo sehingga menjadi landasan emik bagi masyarakat bagaimana seharusnya memperlakukan perempuan secara terhormat. Namun bias dari nilai budaya ini berimplikasi pada munculnya perspektif epic dari masyarakat pendatang yang memandang bahwa ada diskriminasi terhadap perempuan Bupolo. Stigma tersebut seharusnya menjadi masukan bagi pranata-pranata adat dan pranata sosial etnis Buru untuk meningkatkan peran-peran sosial perempuan asli Buru.
3. Terbelenggunya hak-hak perempuan Bupolo sebagai dampak dari budaya yang cenderung bias gender, harus disingkapi oleh pemerintah, pranata adat dan pranata sosial, serta organisasi kemasyarakatan untuk membuat dan melaksanakan model-model pemberdayaan kepada perempuan Bupolo.
4. Pembangunan kepada komunitas adat terpencil harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Buru bersama dinas-dinas terkait.

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Pemerintah perlu meminimalisir hambatan implementasi kebijakan pembangunan dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat Bupolo. Beberapa kebijakan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat adat melalui pranata-paranata adat dan pranata sosial, antara lain melakukan sosialisasi, pelatihan serta bantuan ekonomi kerakyatan. Untuk oknum aparaturnya Negara dan ASN yang melakukan pelanggaran, bisa dilakukan tindakan preventif maupun kuratif. Tindakan preventif dalam bentuk bimbingan, pengarahan dan ajakan. Sementara sanksi tegas (refresif kuratif) juga bisa diterapkan bagi pihak-pihak yang telah membuat pelanggaran administratif yang berdampak pada terhambatnya proses pembangunan pada masyarakat Bupolo.
6. Banyak organisasi (OKP, Ormas, LSM) yang terdata pada pada Kesbangpol Kabupaten Buru, faktanya hanya sebagian yang kecil organisasi tersebut yang memiliki peran terhadap masyarakat Buru. sementara organisasi yang terdaftarpun tidak melakukan program kerja yang jelas, tidak ada identifikasi program yang dilaporkan. Kedepannya harus ada perbaikan manajemen dan pendataan terhadap organisasi-organisasi tersebut.

C. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan Implikasi, dikemukakan sejumlah rekomendasi.

1. Bagi pemerintah

- a. Banyak faktor pendukung dan faktor pengambat pembangunan masyarakat asli Buru khususnya pada komunitas adat terpencil yang harus dicermati oleh pemerintah kabupaten Buru. Potensi wilayah dan sumber daya alam bisa menjadi faktor pendukung pembangunan. Sementara faktor budaya bisa jadi pendukung bisa pula menjadi faktor penghambat pembangunan yang sedang digiatkan oleh pemerintah kabupaten Buru. Pemerintah hendaknya lebih jeli dan komprehensif melihat berbagai permasalahan masyarakat asli Buru terutama yang hidup pada wilayah-wilayah komunitas adat dan komunitas adat terpencil. Mereka sangat butuh sentuhan-sentuhan nyata dari program pemerintah yang selama ini

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dijalankan. Pembangunan infra struktur yang telah dilaksanakan kurang lebih satu dasawarsa ini hendaknya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Buru termasuk komunitas adat yang hidupnya terbelakang, terpencil dan masih dalam derajat kemiskinan dan terpinggirkan baik secara kultural maupun sosialnya.

- b. Hasil penelitian menunjukkan aspek penting yang perlu dibenahi oleh pemerintah kabupaten Buru maupun pemerintah pusat adalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas fisik seperti jalan, bangunan, transportasi dan listrik perlu lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Pemberian bantuan beasiswa pendidikan untuk anak asli perlu lebih ditingkatkan. Sementara pemanfaatan dana BOS bagi sekolah perlu ditingkatkan dan dievaluasi. Penambahan tenaga guru dan tenaga kesehatan di wilayah-wilayah komunitas adat terutama yang terpencil dan terdalam perlu ditingkatkan. Sementara itu pemberian sanksi kepada ASN yang lalai tugas serta kinerja para guru dan petugas kesehatan perlu dievaluasi sehingga hambatan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat diminimalisir. Untuk pembangunan infra struktur seperti perbaikan dan renovasi bangunan-bangunan sekolah dan puskesmas maupun pustu perlu dilaksanakan. Begitupun dengan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah, puskesmas dan pustu. Pembangunan dan perbaikan jalan-jalan pada wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau hendaknya menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Selain itu wilayah-wilayah belum tersentuh aliran listrik hendaknya menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah pembangkit listrik tenaga air di Buru, mengingat banyaknya sungai-sungai besar yang ada di kabupaten Buru. Untuk transportasi perlu dicari solusi dan pemecahannya. Sehingga perjalanan yang biasanya ditempuh dengan berjalan kaki bisa dipermudah dengan fasilitas angkutan umum.

2. Bagi masyarakat

- a. Selama ini hubungan social masyarakat asli dengan masyarakat pendatang sudah semakin baik. Adanya sekat-sekat promodialisme sudah semakin terkikis meskipun secara kultur maupun wilayah masyarakat asli masih hidup dalam lingkup komunitasnya atau clannya. Masyarakat perlu menghapus sekat-sekat antara pendatang dengan asli, sehingga hubungan personal maupun komunal antar warga dapat terjalin dengan baik.
- b. Perlu ada peran penting dan strategis dari masyarakat sebagai kelompok *civil society* terhadap masyarakat asli Buru, sehingga berbagai kesulitan dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat asli (KAT) bisa teratasi. Peran-peran masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan potensi diri dan potensi organisasi untuk kemaslahatan umat. Kegiatan-kegiatan atau program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan warga KAT bisa dilakukan, antara lain kualitas SDM melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal, kegiatan keagamaan melalui pembangunan rumah ibadah dan ceramah serta pengajian-pengajian, bantuan dan pelatihan kesehatan serta pertanian dan peternakan. Hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, maupun melalui organisasi-organisasi yang ada serta bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai pranata social yang ada hendaknya bekerja sama dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan potensi masyarakat asli Buru. Sifat-sifat kedaerahan dan sekat-sekat primodialisme hendaknya diminimalisir. Anak-anak muda sebagai *agen of change* bisa dilibatkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pranata-pranata sosial lebih difungsikan dan berinovasi dalam berbagai aspek.

3. Bagi lembaga pendidikan

- a. Lembaga pendidikan tinggi secara umum hendaknya berinovasi mengembangkan program-program keterlibatan warga negara (*civic engagement*) secara sistemik dengan membangun kemitraan dengan masyarakat sehingga eksistensinya benar-benar “membumi” sebagai agen

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perubahan guna memberdayakan masyarakat. Kolaborasi antara perguruan tinggi (*civitas akademika*) dengan elemen masyarakat (*civil society*) maupun pranata-pranata sosial dan pranata adat perlu ditingkatkan sehingga menghasilkan langkah-langkah inovatif yang mampu meningkatkan *civil engagement* masyarakat asli Buru.

- b. Lembaga Pendidikan dalam hal ini LPTK hendaknya mendorong dan memfasilitasi pengembangan kecakapan mahasiswa selaku warga negara muda yang cakap, handal, berinovasi dan mampu berkompetisi dalam meningkatkan kualitas ilmunya maupun kualitas masyarakat disekitarnya. Mahasiswa sebagai calon guru hendaknya dilatih dan ditingkatkan kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan kekayaan pranata sosial masyarakat Indonesia sebagai medium dan objek pembelajaran agar memiliki kesiapan dini yang handal dalam menjalankan pengabdian mereka di masyarakat di masa mendatang.
- c. Disiplin ilmu PKn sangat kaya sumber belajar di masyarakat. Pranata-pranata social maupun pranata adat sebagai laboratorium demokrasi mempunyai manfaat yang besar terhadap pembelajaran demokrasi. Untuk itu para dosen dan guru hendaknya memberdayakan atmosfer pembelajaran PKn di sekolah maupun di masyarakat sehingga lebih bermakna (*meaningfull*) dalam rangka memahami, mengkritisi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan social kemasyarakatan maupun kenegaraan. Dengan demikian mereka secara sistemik dan programatik memperkenalkan keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia dalam berbagai pranata social maupun pranata adat sebagai subjek didik untuk selanjutnya menjadi sumber nilai dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- d. Lembaga pendidikan dasar dan menengah sebagai embrio pendidikan di Indonesia bisa berinovasi dengan kurikulum-kurikulum pendidikan yang mampu mengasah potensi dan kekayaan intelektual peserta didik. Kurikulum pendidikan bukan hanya terpusat atau bersumber dari kurikulum pusat, namun secara mandiri mampu berinovasi dalam meningkatkan peran serta warga masyarakat khususnya warga asli Buru

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam berbagai dinamika pendidikan maupun politik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran utama dapat disenergikan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai kerangka pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) maupun keterlibatannya sebagai warga negara (*civil engagement*).

- e. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan UPI, penelitian tentang hak-hak kewarganegaraan Perempuan dikaitkan dengan peran gender masih jarang diteliti. Sehingga penelitian pada perempuan Bupolo ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan tentang budaya masyarakat di Indonesia Timur. Kedepannya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa PKn tentang peran-peran gender perempuan sehingga menjadi salah satu sumber rujukan bagi penelitian sesudahnya.

4. Bagi peneliti

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini membuka tabir permasalahan masyarakat asli Buru terutama mereka yang hidup pada wilayah-wilayah terpencil dan terbelakang. Berbagai permasalahan terkait masyarakat Bupolo dapat peneliti kupas secara terstruktur dan komprehensif meskipun terdapat keterbatasan sejak awal hingga berakhirnya penelitian dan penulisan disertasi ini. Penelitian ini selain menambah wawasan dan khasanah peneliti tentang budaya masyarakat asli Buru, juga menambah pemahaman dan pembelajaran begitu kayanya budaya bangsa Indonesia.
- b. Penelitian ini makin membuka cakrawala berpikir peneliti bahwa disiplin ilmu Pendidikan kewarganegaraan tidak semata-mata hanya ditemui dalam pendidikan formal saja (sekolah), namun juga dalam berbagai domain sosial kemasyarakatan. Berbagai keragaman etnik di Indonesia menyimpang kekayaan sosio kultural sebagai objek garapan *community civic*. Untuk itulah berbagai kekayaan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia perlu di gali, diperdalam dalam berbagai penelitian-penelitian

FATIMAH SIALANA, 2018

KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ASLI (BUPOLO) (Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Propinsi Maluku)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maupun pembelajaran ke depannya sehingga mampu memperkaya cakrawala dan khasanah Pendidikan Kewarganegaraan.

5. Bagi peneliti berikutnya

- a. Penelitian ini telah menghasilkan satu kerangka hipotetik model pengembangan PKn untuk perempuan Bupolo. Kedepannya diharapkan ada penelitian berikutnya yang mampu menghasilkan model pengembangan PKn bagi perempuan Bupolo serta menghasilkan satu model kurikulum pembelajaran alam terhadap anak-anak asli Buru sehingga penemuan model kurikulum ini bisa menjadi salah satu materi pembelajaran muatan local baik di persekolahan maupun di perguruan tinggi.
- b. Hasil dan temuan dari penelitian ini dapat juga diimplementasikan dalam penelitian di wilayah hukum adat lain di Indonesia. Sehingga menambah wawasan dan khasanah kewarganegaraan bagi semua masyarakat belajar Indonesia.